



Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Jln. Raya Cigasong-Jatiwangi
Kecamatan Cigasong
Kabupaten Majalengka





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggungjawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka yang lebih baik. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Paraf Kordinasi	
Sekretaris	
Kabid. Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip	
Kabid. Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	
Kabid. Perpustakaan	

Majalengka, 27 Februari 2026
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka,


Drs. ONO HARYONO, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 197001231990091001

Ringkasan Eksekutif

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 memiliki dua Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Literasi Masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat serta Arsip Terkelola secara Tertib dengan indikator Indeks Kearsipan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat yang diperoleh melalui proses pendataan menggunakan kuesioner yang telah ditentukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diukur berdasarkan Dimensi Kepatuhan dan Kinerja. Selanjutnya Indeks Kearsipan merupakan akumulasi dari hasil penilaian terhadap pengelolaan arsip di OPD (bobot: 40%) dan LKD (bobot: 60%).

Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah 8,26% dari target 70,00 dan realisasi 5,78. Untuk capaian Indeks Kearsipan adalah 104,94% dari target 82,00 dan realisasi 86,05.

Adapun program yang mendukungnya yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Perpustakaan, Pengelolaan Arsip, serta Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Efisiensi anggaran untuk sasaran Indeks Kearsipan yang tercapai sebesar 0,02% atau Rp. 36.000,00 sedangkan untuk sasaran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat efisiensi anggaran tidak dapat dihitung karena sasaran tidak mencapai 100%.

Daftar Isi

i

Kata Pengantar

ii

Ringkasan Eksekutif

iii

Daftar Isi

1

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawaian
Isu Strategis
Sistematika Pelaporan

7

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026
Perkin Tahun 2025
Rencana Anggaran Tahun 2025

10

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

47

BAB IV Penutup

Lampiran

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja pada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada taun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka yang disingkat Disarpusda setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

a. Kedudukan

Berdasarkan Perbup 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

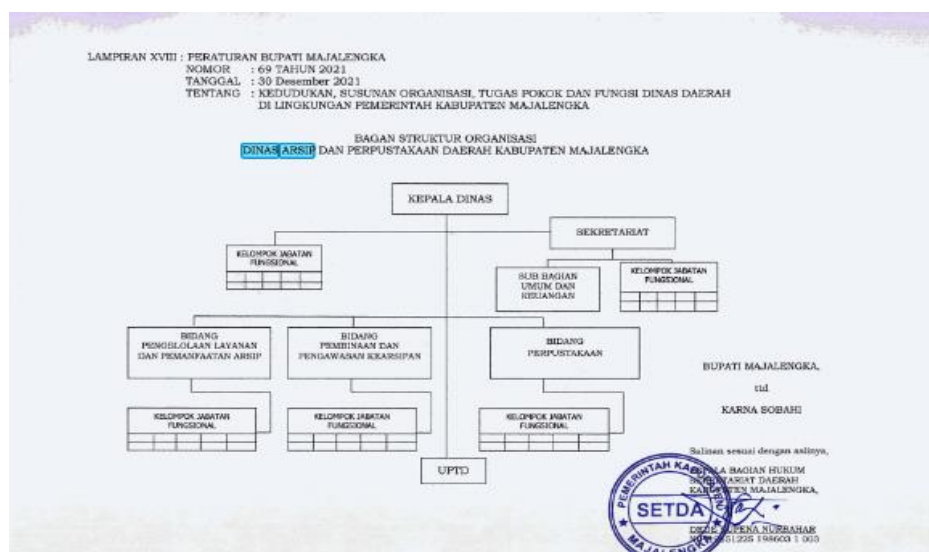
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
5. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 26 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

Perempuan : 13 orang

Laki-laki : 13 orang

b. Eselon

Eselon II.a : -

Eselon II.b : 1 orang

Eselon III.a : 1 orang

Eselon III.b : 3 orang

Eselon IV.a : 1 orang

Eselon IV.b : -

c. Golongan

	Gol.I	Gol.II	Gol.III	Gol.IV	Gol.V	Gol.VII	Gol.IX
PNS	-	1	10	4	-	-	-
PPPK	1	-	1	-	2	1	6

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi : 1 orang

Jabatan Administrator : 4 orang

Jabatan Pengawas : 1 orang

Jabatan Fungsional Tertentu : 13 orang

Pelaksana : 7 orang

e. Pendidikan

SD : 1 orang

SMP : 1 orang

SMA : 3 orang

D.II : 1 orang

D.III : 2 orang

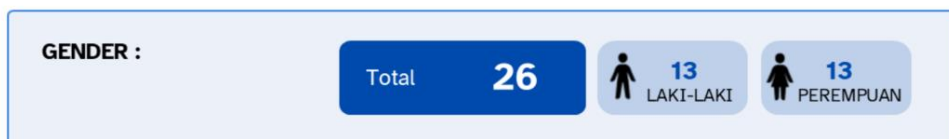
D.IV : 1 orang

S1 : 12 orang

S2 : 5 orang

Infografik ASN

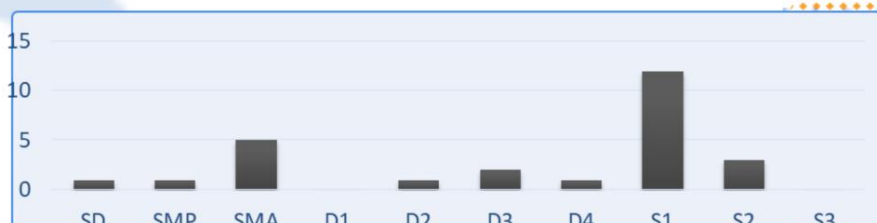
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH



GOLONGAN



PENDIDIKAN



1.3 Isu Strategis

Isu strategis dalam implementasi kebijakan publik dapat merupakan masalah yang belum diselesaikan, dan sebagai bagian dari peran utama badan-badan publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi organisasi. Adapun masalah yang telah diidentifikasi sebagai suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pelayanan publik menjadi isu kian strategis manakala kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan munculnya berbagai fenomena / kejadian pada dekade ini, sudah pasti membawa dampak yang beragam pada kinerja perpustakaan dan kearsipan. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan krisis identitas bangsa. Kondisi ini patut mendapat perhatian dari lembaga perpustakaan dan kearsipan, karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada pembinaan, pengembangan, pembuatan kebijakan serta penyelamatan sumber informasi primer maupun sekunder. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran Tahun 2024-2026 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah yaitu mewujudkan Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengelolaan Arsip dengan Tertib. Sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menanggapi isu strategis yang berkaitan dengan peningkatan minat baca dan budaya literasi serta pengelolaan arsip.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum, data kepegawaian dan isu strategis yang terjadi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Cascading, Dokumentasi Penyerahan LKIP kepada Pimpinan, Bukti sebar LKIP kepada seluruh pegawai, Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik dan SK Tim LKIP.



02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berikut ini tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah periode tahun 2024-2026:

Tujuan
Meningkatnya kualitas pendidikan
Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

Sasaran
Meningkatnya Literasi Masyarakat
Arsip terkelola secara tertib

Indikator
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indeks Kearsipan

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut tabel Perjanjian Kinerja selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja 2024-2026
Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan	
					2024	2025	2026	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	83,30	83,50	84,00	70,00	2,00
2.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Arsip terkelola secara tertib	Indeks Kearsipan	Nilai	78,00	79,00	80,00	82,00	82,30

Target Tahun 2025 pada sasaran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mengalami perubahan dikarenakan terdapat perubahan pada instrumen pendataan Indeks Pengembangan Literasi Masyarakat (IPLM) oleh Perpustakaan Nasional RI dari yang semula hanya ada 7 komponen indikator menjadi 29 komponen Indikator. Hal ini membuat target tersebut perlu disesuaikan lagi dari 83,50 menjadi 70,00, turun 13,5 poin. Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70 Nilai
2.	Arsip Terkelola Secara Tertib	Indeks Kearsipan	82 Nilai

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang bersumber dari APBD yang terdiri dari :

Tabel 2.3
Rencana Anggaran Tahun 2025

Program	Rencana Anggaran	Persentase (%)
Pembinaan Perpustakaan	Rp 885.035.900,00	17,27
Pengelolaan Arsip	Rp 88.364.900,00	1,72
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 77.064.000,00	1,50
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.075.381.287,00	79,51
Jumlah Anggaran	Rp 5.125.846.087,00	100

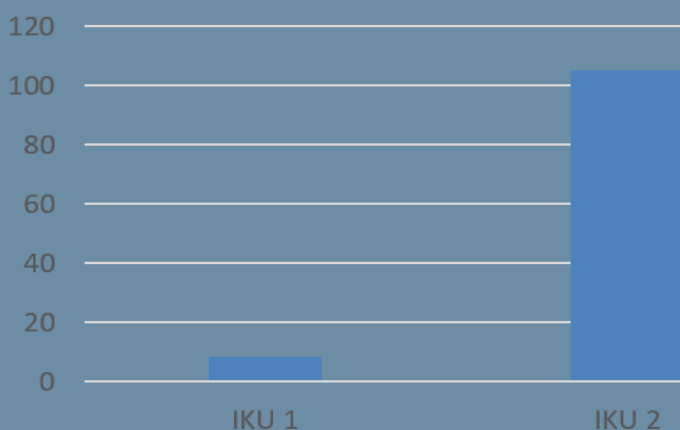
03

AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tercermin dari capaian 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 56,6%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 2 sasaran dan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian Kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 56,6%. Dari 2 indikator sasaran yang ditargetkan Sebanyak 1 indikator mencapai kinerja lebih dari 100% dan 1 target indikator yang kurang mencapai 100%.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70,00	5,78	8,26
2.	Arsip Terkelola Secara Tertib	Indeks Kearsipan	82,00	86,05	104,94

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran Pertama

Untuk menjawab isu strategis yang berkaitan dengan peningkatan minat baca dan budaya literasi serta pengelolaan arsip dan mewujudkan mandat dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia serta korelasi dengan sasaran Bupati, maka ditetapkan sasaran strategis Meningkatkan Literasi Masyarakat dan Arsip Terkelola Secara Tertib.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menjadi indikator dari Meningkatkan Literasi Masyarakat dibangun berdasarkan dua dimensi yaitu Dimensi Kepatuhan, dan Dimensi Kinerja dengan empat variabel yaitu sebagai berikut :

Dimensi	Variabel	Indikator	Definisi Operasional
Kepatuhan	Koleksi	Jumlah Judul Koleksi Tercetak	Jumlah keseluruhan judul bahan pustaka dalam bentuk fisik yang dimiliki oleh perpustakaan.
		Jumlah Eksemplar Koleksi Tercetak	Jumlah keseluruhan eksemplar bahan pustaka dalam bentuk fisik yang dimiliki oleh perpustakaan.
		Jumlah Judul Koleksi Digital	Jumlah keseluruhan judul bahan pustaka dalam format digital yang dimiliki dan diperoleh perpustakaan secara resmi (jual beli, hibah, hadiah, atau tukar menukar) serta dapat diakses oleh pemustaka.
		Jumlah Eksemplar Koleksi Digital	Jumlah keseluruhan eksemplar bahan pustaka dalam format digital yang dimiliki dan diperoleh perpustakaan secara resmi (jual beli, hibah, hadiah, atau tukar menukar) serta dapat diakses oleh pemustaka.
		Penambahan Jumlah Judul Koleksi Tercetak Dalam 1 Tahun Terakhir	Jumlah judul koleksi dari bahan perpustakaan tercetak yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan dalam satu tahun terakhir
		Penambahan Jumlah Eksemplar Koleksi Tercetak Dalam 1 Tahun Terakhir	Jumlah eksemplar koleksi dari bahan perpustakaan tercetak yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan dalam satu tahun terakhir
		Penambahan Jumlah Judul Koleksi Digital Dalam 1 Tahun Terakhir	Jumlah judul koleksi dari bahan perpustakaan digital yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan dalam satu tahun terakhir.
		Penambahan Jumlah Eksemplar Koleksi Digital Dalam 1 Tahun Terakhir	Jumlah eksemplar koleksi dari bahan perpustakaan digital yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan dalam satu tahun terakhir.

		Jumlah Anggaran Pengembangan Koleksi Tercetak dan Digital Dalam 1 Tahun Terakhir	Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait selama satu tahun anggaran untuk membeli, menambah, atau memperbarui koleksi bahan perpustakaan, baik berupa buku cetak maupun bahan digital (e-book, jurnal elektronik, dan sumber digital lainnya)	
		Jumlah Anggaran Pengembangan Koleksi Tercetak dan Digital Dalam 1 Tahun Terakhir yang Berasal dari Dana BOS	Jumlah anggaran yang berasal dari dana BOS untuk dialokasikan bagi koleksi perpustakaan dalam satu tahun terakhir	
		Jumlah Anggaran Pengembangan Koleksi Tercetak dan Digital Dalam 1 Tahun Terakhir yang Berasal dari Dana non BOS	Jumlah anggaran yang berasal dari dana non BOS untuk dialokasikan bagi koleksi perpustakaan dalam satu tahun terakhir	
	Tenaga	Jumlah Tenaga Perpustakaan Memiliki Kualifikasi Pendidikan Ilmu Perpustakaan (Orang)	Jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Diploma (D2) di bidang Ilmu Perpustakaan.	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan Tidak Memiliki Kualifikasi Pendidikan Ilmu Perpustakaan (Orang)	Jumlah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang memiliki surat keputusan resmi dari lembaga/yayasan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Perpustakaan	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) Di Bidang Perpustakaan Dalam 1 Tahun Terakhir (Orang)	Jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang mengikuti kegiatan pengembangan keprofesional berkelanjutan (PKB), seperti pelatihan, seminar, lokakarya, sertifikasi, atau kegiatan sejenis yang mendukung kinerja perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat yang mencantumkan jam pelatihan dalam kurun waktu satu tahun terakhir.	
		Jumlah Anggaran Pengembangan Keprofesional (Diklat) Tenaga Perpustakaan Dalam 1 Tahun Terakhir	Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait selama satu tahun anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, kursus, workshop, atau program peningkatan kompetensi lainnya bagi pustakawan dan tenaga teknis	
	Kinerja	Pelayanan	Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Budaya Baca dan Peningkatan Kecakapan Literasi Dalam 1 Tahun Terakhir (Orang)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan dalam satu tahun terakhir
			Jumlah Pemustaka dari Satuan Pendidikan Atau Masyarakat yang Memanfaatkan Perpustakaan Secara Luring dan/atau Daring	Jumlah pemustaka yang menggunakan layanan perpustakaan, baik luring maupun daring dalam satu tahun terakhir

	Dalam 1 Tahun Terakhir (Orang)	
	Jumlah Pemustaka yang Menggunakan Fasilitas Sarana TIK di Perpustakaan Dalam 1 Tahun Terakhir (Orang)	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di Perpustakaan dalam satu tahun terakhir, misalnya komputer, internet, perangkat lunak edukatif, audio book, atau akses ke basis data digital
	Jumlah Judul Koleksi Tercetak yang Dimanfaatkan Dalam 1 Tahun Terakhir	Jumlah judul bahan pustaka cetak yang dipinjam, dibaca di tempat, atau silang pinjam koleksi yang digunakan oleh pemustaka dalam satu tahun terakhir.
	Jumlah Eksemplar Koleksi Tercetak yang Dimanfaatkan Dalam 1 Tahun Terakhir	Jumlah eksemplar bahan pustaka cetak yang dipinjam, dibaca di tempat, atau silang pinjam koleksi yang digunakan oleh pemustaka dalam satu tahun terakhir.
	Jumlah Judul Koleksi Digital yang Dimanfaatkan Dalam 1 Tahun Terakhir	Jumlah akses atau penggunaan judul bahan perpustakaan dalam bentuk digital oleh pemustaka, misalnya unduhan, kunjungan, atau pencarian dalam basis data elektronik dalam satu tahun terakhir.
	Jumlah Eksemplar Koleksi Digital yang Dimanfaatkan Dalam 1 Tahun Terakhir	Jumlah akses atau penggunaan eksemplar bahan perpustakaan dalam bentuk digital oleh pemustaka, misalnya unduhan, kunjungan, atau pencarian dalam basis data elektronik dalam satu tahun terakhir.
Penyelenggaraan dan Pengelolaan	Jumlah Kegiatan Penguatan Budaya Baca dan Peningkatan Kecakapan Literasi Dalam 1 Tahun Terakhir	Jumlah program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi pengguna dalam satu tahun terakhir, misalnya lokakarya (workshop) literasi, program membaca, seminar edukasi, kegiatan penjangkauan pemustaka diluar perpustakaan, atau kegiatan literasi digital
	Jumlah Kolaborasi/Kerja Sama Perpustakaan dengan Pihak Eksternal Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan Dalam 1 Tahun Terakhir (Kegiatan Kerja Sama)	Jumlah kerja sama formal atau informal yang dilakukan perpustakaan dengan pihak eksternal, seperti institusi pendidikan, komunitas literasi, penerbit, atau perusahaan, dalam upaya meningkatkan layanan dan pengembangan perpustakaan dalam satu tahun terakhir
	Jumlah Variasi Layanan yang Tersedia (Fisik Dan Digital)	Jumlah berbagai jenis layanan yang tersedia di perpustakaan, baik dalam bentuk fisik maupun digital
	Jumlah Kebijakan dan Prosedur Pelayanan Perpustakaan (Dokumen)	Jumlah dokumen kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis yang mengatur penyelenggaraan layanan perpustakaan, misalnya layanan peminjaman, referensi, ruang baca, pocadi, perpustakaan keliling, e-library, akses database online, katalog digital dan lain-lain

		Jumlah Anggaran untuk Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Perpustakaan Selama 1 Tahun Terakhir	Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait dalam satu tahun anggaran untuk mendukung kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, serta pengembangan layanan perpustakaan, termasuk sarana prasarana, teknologi informasi, dan program layanan kepada masyarakat
		Jumlah Peraturan (Kebijakan) Tentang Perpustakaan	Jumlah dokumen peraturan, kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang perpustakaan yang ditandatangani pejabat daerah

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode survey pendataan yang datanya diambil dari uji coba tahap kedua yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional untuk lingkup Perpustakaan Sekolah (SD/SMP) & Umum (Desa/Kelurahan dan TBM).

INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (IPLM)

Meningkatnya Literasi Masyarakat Kabupaten Majalengka

Capaian Tahun 2025

8,26%
 Target **70,00** Realisasi **5,78**

Realisasi Tahun 2024

69,38

Target Akhir RPD

70,00

Capaian Tahun 2024

86,40%

Realisasi
Provinsi/Pusat

18,07%

Faktor yang Mempengaruhi

Faktor Internal

- Koleksi perpustakaan sesuai ketentuan
- Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan
- Pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan
- Kualitas tenaga perpustakaan
- Kualitas pelayanan perpustakaan

Faktor Eksternal

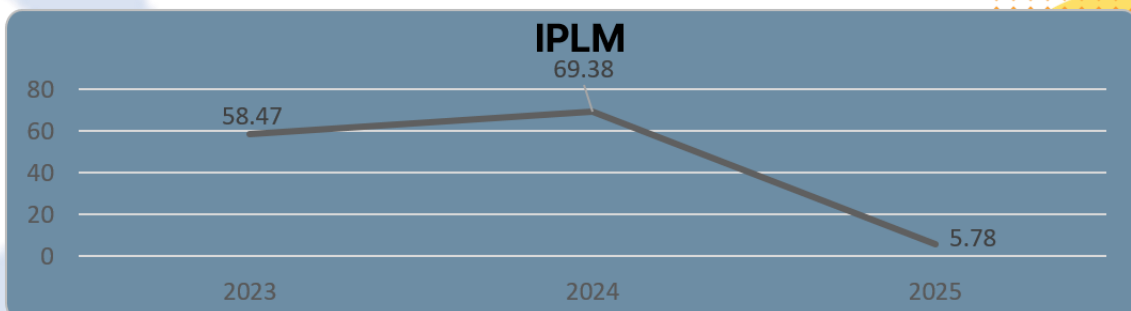
- Banyaknya unit layanan perpustakaan yang tidak memenuhi standar nasional
- Banyaknya organisasi/lembaga/komunitas yang belum mempunyai tempat khusus layanan perpustakaan
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi pada unit layanan perpustakaan

Program yang Mendukung

- Program Pembinaan Perpustakaan

Efisiensi

IPLM tahun 2025 tidak bisa disandingkan dengan target karena adanya perubahan formulasi perhitungan dan instrumen pendataan pada tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target. Pengukuran IPLM dititikberatkan pada dimensi kinerja sebesar 70 persen sedangkan dimensi kepatuhan/fisik sebesar 30 persen dengan Instrumen pendataan sebanyak 29 komponen indikator. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya formulasi perhitungan diperoleh dari Unsur-unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang bersumber dari Data Sekunder dan Aspek Masyarakat (AM) yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan instrumen pendataan sebanyak 7 komponen indikator.



INDIKATOR 1
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Tabel 3.2
Target Realisasi Capaian IPLM Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70,00	5,78	8,26


Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah Data Indeks Tingkat Pembangunan Literasi Masyarakat yang diperoleh melalui proses pendataan menggunakan kuesioner yang telah ditentukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diukur berdasarkan Dimensi Kepatuhan dan Kinerja dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Literasi Masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2025 tidak mencapai target kinerja yang diperjanjikan yaitu sebesar 8,26%. Target IPLM pada tahun 2025 sebesar 70,00 namun realisasinya hanya sebesar 5,78.

Hal ini disebabkan IPLM tahun 2025 tidak bisa disandingkan dengan target karena formulasi perhitungan dan instrumen pendataan pada tahun 2025 diperoleh melalui proses pendataan menggunakan kuesioner yang telah ditentukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diukur berdasarkan Dimensi Kepatuhan dan Kinerja dengan instrumen pendataan sebanyak 29 komponen indikator. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya

formulasi perhitungan diperoleh dari Unsur-unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang bersumber dari Data Sekunder dan Aspek Masyarakat (AM) yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan instrumen pendataan sebanyak 7 komponen indikator.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024



PROVINSI/ KAB/ KOTA	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	SKOR IPLM
Kab. Madaya	0,5960	0,1316	1,0000	0,1293	1,0000	1,0000	1,0000	49,30
Kab. Pangasinan	0,5909	0,2982	1,0000	1,0000	0,9100	1,0000	1,0000	77,10
Kab. Perwakarta	0,4875	0,1917	1,0000	0,2893	1,0000	1,0000	1,0000	70,90
Kab. Subang	0,3916	0,0549	0,6895	0,0475	1,0000	0,8970	1,0000	58,29
Kab. Sukabumi	0,2638	0,1857	0,3524	0,7576	1,0000	1,0000	1,0000	65,14
Kab. Sumedang	0,8680	0,2894	0,8339	0,5396	1,0000	0,8171	1,0000	64,97
Kab. Tasikmalaya	0,3412	0,0614	0,4942	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	69,95
Kota Bandung	1,0000	0,7115	0,7331	0,6997	1,0000	0,9331	1,0000	86,82
Kota Banjar	1,0000	0,3198	1,0000	0,2581	1,0000	1,0000	1,0000	79,68
Kota Bekasi	0,4446	0,0715	0,6081	0,0312	1,0000	1,0000	1,0000	59,36
Kota Bogor	0,4940	0,1559	1,0000	0,8356	1,0000	1,0000	1,0000	78,36
Kota Cimahi	0,7204	0,5229	1,0000	0,0402	1,0000	1,0000	1,0000	75,55
Kota Cirebon	1,0000	0,2757	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	95,37
Kota Depok	0,5028	1,0000	0,6900	0,5089	1,0000	1,0000	1,0000	81,57
Kota Sukabumi	0,9864	0,5624	1,0000	0,5977	1,0000	1,0000	1,0000	87,81
Kota Tasikmalaya	0,6606	0,4030	1,0000	1,0000	0,8354	1,0000	1,0000	72,84

Berdasarkan tabel di atas pencapaian IPLM Provinsi Jawa Barat sebesar 72,76 dan masuk dalam kategori **Sedang**. Tiga Kab/Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kota Cirebon 95,37; Kota Sukabumi 87,81; dan Kota Bandung 86,82. Sedangkan tiga Kab/Kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kab. Garut 44,59; Kab. Garut 56,77; dan Kab. Cirebon 57,56.

Berikut sajian rincian data nilai IPLM Provinsi Jawa Barat tahun 2024 beserta interpretasinya.

Jumlah Penduduk (BPS 2022)	49.860.330
Jumlah Civitas Sekolah (BPS 2022)	10.235.607
Jumlah Civitas Akademika (BPS 2022)	1.057.015
Jumlah Kelembagaan (BPS 2022)	46.661

NO	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT	NILAI	INTERPRETASI
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,5236	Pencapaian layanan perpustakaan sebesar 52 persen dari standar
2	Keterseluruhan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)	0,2746	Pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 27 persen dari standar
3	Keterseluruhan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,9023	Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 90 persen dari standar

Laporan Akhir
Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024

172	KAB. LAMPUNG SELATAN	0,039	0,03	0,042	0,073	0,034	0,058	0,13
173	KAB. LAMPUNG TENGAH	0,027	0,022	0,07	0,063	0,024	0,067	0,05
174	KAB. LAMPUNG TIMUR	0,117	0,173	0,118	0,256	0,145	0,107	12,78
175	KAB. LAMPUNG UTARA	0,088	0,111	0,121	0,103	0,104	0,112	10,88
176	KAB. LANDAK	0,080	0,138	0,043	0,1	0,113	0,072	4,04
177	KAB. LANGKAT	0,138	0,168	0,127	0,22	0,153	0,173	8,8
178	KAB. LEBAK	0,214	0,137	0,199	0,261	0,178	0,23	0,6
179	KAB. LEBONG	0,111	0,184	0,106	0,218	0,147	0,162	0,05
180	KAB. LEMBATA	0,155	0,284	0,167	0,291	0,209	0,229	3,28
181	KAB. LIMA PULUH KOTA	0,184	0,185	0,186	0,284	0,184	0,225	19,87
182	KAB. LINGGA	0,035	0,061	0,124	0,126	0,048	0,126	10,23
183	KAB. LOMBOK BARAT	0,082	0,092	0,113	0,105	0,087	0,109	3,28
184	KAB. LOMBOK TENGAH	0,014	0,024	0,014	0,02	0,019	0,017	1,73
185	KAB. LOMBOK TIMUR	0,223	0,268	0,215	0,274	0,246	0,244	0,81
186	KAB. LOMBOK UTARA	0,036	0,055	0,106	0,088	0,048	0,067	8,15
187	KAB. LUMAJANG	0,091	0,171	0,074	0,127	0,131	0,101	7,29
188	KAB. LUWU	0,008	0,151	0,091	0,165	0,11	0,128	5,53
189	KAB. LUWU TIMUR	0,126	0,126	0,127	0,204	0,126	0,165	15,37
190	KAB. LUWU UTARA	0,157	0,206	0,198	0,324	0,182	0,261	7,01
191	KAB. MADURA	0,098	0,138	0,096	0,19	0,118	0,143	13,56
192	KAB. MAGELANG	0,193	0,286	0,243	0,222	0,239	0,233	12,31
193	KAB. MAGETAN	0,078	0,042	0,061	0,064	0,06	0,062	0,04
194	KAB. MAJALENGA	0,102	0,101	0,101	0,149	0,101	0,125	5,78
195	KAB. MAJENE	0,214	0,29	0,199	0,226	0,252	0,213	2,13
196	KAB. MALAKA	0,097	0,05	0,159	0,136	0,073	0,146	0,97
197	KAB. MALANG	0,145	0,154	0,143	0,207	0,149	0,205	5,83
198	KAB. MALUKU	0,143	0,154	0,137	0,193	0,149	0,165	5,34
199	KAB. MALUKU TENGAH	0,142	0,132	0,127	0,16	0,137	0,143	1,45
200	KAB. MALUKU TENGARA	0,059	0,078	0,074	0,07	0,069	0,072	1,61
201	KAB. MAMLUK	0,181	0,183	0,193	0,283	0,182	0,238	1,23
202	KAB. MANGALING NATAI	0,028	0,079	0,050	0,107	0,054	0,083	4,78
203	KAB. MANGGARAI BARAT	0,143	0,236	0,254	0,313	0,189	0,284	3,47
204	KAB. MANGGARAI BARAT	0,017	0,054	0,016	0,025	0,036	0,02	2,49
205	KAB. MANGGARAI TIMUR	0,03	0,073	0,186	0,217	0,052	0,202	0,65
206	KAB. MANGKAWA	0,307	0,256	0,292	0,425	0,308	0,359	4,36
207	KAB. MAPII	0,109	0,13	0,11	0,179	0,12	0,144	0,22

Capaian IPLM Kabupaten Majalengka Tahun 2024

Capaian IPLM Kabupaten Majalengka Tahun 2025

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian
IPLM Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Penurunan
Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	5,78	69,38	-63,6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Penurunan
Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	8,26%	86,40%	-78,14%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 63,6 poin dibanding dengan realisasi tahun 2024.

Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, capaian Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 78,14%.

Penurunan realisasi dan capaian dikarenakan adanya perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menggunakan instrument dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Pengukuran IPLM dititikberatkan pada dimensi kinerja sebesar 70 persen sedangkan dimensi kepatuhan/fisik sebesar 30 persen.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi IPLM Tahun 2025
dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	5,78	70,00	-64,22

Dari tabel di atas dapat diketahui hasil perbandingan capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dengan target akhir Renstra 2024-2026 yang ternyata realisasinya relatif jauh dalam mencapai target akhir Renstra yang sudah ditetapkan, yaitu kurang 64,22 poin. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan adanya perubahan penilaian pendataan pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Sehingga perlu dimaksimalkan sumber daya yang ada agar kekurangan poin tersebut dapat tercapai sesuai dengan target akhir Renstra.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata standar Provinsi

Tabel 3.5
Realisasi IPLM Tahun 2025 dengan Rata-rata Standar Provinsi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Rata-rata Provinsi	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	8,26	18,07	9,81

Berdasarkan tabel diatas realisasi Kabupaten Majalengka masih kurang 9,81 poin jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan nilai 18,51.

Sebagai informasi tambahan bahwa selain melaksanakan pengumpulan data atas kajian capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka juga melaksanakan pengumpulan data atas kajian Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) di Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS RI) yang bertujuan untuk :

1. Menjawab Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
 2. Mengetahui Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di tingkat kabupaten/kota;
 3. Mengetahui kondisi kegemaran membaca masyarakat di tingkat kabupaten/kota;
 4. Mengevaluasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan strategi pembangunan; dan
 5. Pendayagunaan perpustakaan/penyedia bahan bacaan di daerah.
- Adanya pengelolaan data berkel-anjutan terkait Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun Unsur yang dijadikan Instrumen dalam Penilaian Tingkat

NILAI AKHIR IPLM PROVINSI

NO.	PROVINSI	VARIABEL SDM	VARIABEL KOLEKSI	VARIABEL PELAYANAN	VARIABEL PENGELOLAAN	DIMENSI KEPATUHAN	DIMENSI KINERJA	IPLM
1	ACEH	0.495	0.416	0.403	0.5	0.456	0.452	45.29
2	BANTEN	0.667	0.487	0.526	0.67	0.577	0.598	48.59
3	BENGKULU	0.457	0.31	0.359	0.422	0.383	0.391	36.5
4	DI YOGYAKARTA	0.452	0.478	0.463	0.564	0.465	0.513	48.05
5	DKI JAKARTA	0.556	0.52	0.506	0.608	0.538	0.557	44.15
6	GORONTALO	0.244	0.095	0.139	0.169	0.17	0.154	10.46
7	JAMBI	0.615	0.514	0.532	0.652	0.565	0.592	25.53
8	JAWA BARAT	0.235	0.151	0.167	0.184	0.193	0.175	18.07
9	JAWA TENGAH	0.488	0.404	0.431	0.512	0.446	0.472	38.86
10	JAWA TIMUR	0.61	0.523	0.53	0.593	0.567	0.561	56.29
11	KALIMANTAN BARAT	0.558	0.366	0.395	0.474	0.462	0.434	34.98
12	KALIMANTAN SELATAN	0.31	0.25	0.22	0.273	0.28	0.246	25.16
13	KALIMANTAN TENGAH	0.201	0.146	0.104	0.197	0.173	0.151	6.28
14	KALIMANTAN TIMUR	0.469	0.45	0.394	0.472	0.46	0.433	44.11
15	KALIMANTAN UTARA	0.412	0.326	0.315	0.394	0.369	0.354	35.87
16	KEP. BANGKA BELITUNG	0.429	0.367	0.387	0.456	0.398	0.422	37.1
17	KEP. RIAU	0.516	0.408	0.415	0.638	0.461	0.527	36.04
18	LAMPUNG	0.525	0.332	0.336	0.423	0.428	0.38	32.3
19	MALUKU	0.194	0.382	0.387	0.485	0.288	0.436	30.18
20	MALUKU UTARA	0.191	0.068	0.152	0.152	0.13	0.152	10.98
21	NUSA TENGGARA BARAT	0.433	0.407	0.374	0.475	0.42	0.424	31.77
22	NUSA TENGGARA TIMUR	0.402	0.39	0.366	0.522	0.396	0.444	40.56
23	PAPUA	0.133	0.069	0.065	0.155	0.101	0.11	2.74
24	PAPUA BARAT	0.401	0.555	0.401	0.65	0.478	0.525	34.64
25	RIAU	0.369	0.381	0.394	0.489	0.375	0.441	27.02
26	SULAWESI BARAT	0.48	0.407	0.36	0.466	0.443	0.413	25.72
27	SULAWESI SELATAN	0.517	0.483	0.472	0.531	0.5	0.501	47.74
28	SULAWESI TENGAH	0.255	0.341	0.333	0.269	0.298	0.301	30.04

Kegemaran Membaca (TKM) Tahun 2025 berbeda dengan Instrumen Penilaian Tingkat Gemar Membaca (TGM) Tahun 2024.

Berikut perbandingan instrumen Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2024 dan Tahun 2025. Instrumen TGM tahun 2024, diantaranya : (1) Frekuensi Membaca (FM), (2) Durasi Membaca, (3) Jumlah Buku Bibaca (JB), (4) Frekuensi Akses Internet (FAI), (5) Durasi Akses Internet (DAI).

Berikut nilai TKM Tahun 2025 :

154	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	51.07	55.45	62.28	57.24	rendah
155	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	49.28	54.69	66.11	57.93	rendah
156	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	51.02	54.95	62.01	56.88	rendah
157	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	52.83	57.95	62.32	58.78	rendah
158	Jawa Barat	Kab. Bandung	53.37	57.05	61.68	58.18	rendah
159	Jawa Barat	Kab. Bandung Barat	54.66	58.21	63.8	59.69	rendah
160	Jawa Barat	Kab. Bekasi	53.13	57.65	62.41	58.7	rendah
161	Jawa Barat	Kab. Bogor	53.49	57.67	65.54	59.86	rendah
162	Jawa Barat	Kab. Ciamis	55.52	58.95	63.15	59.97	rendah
163	Jawa Barat	Kab. Cianjur	54.81	58.73	63.22	59.78	rendah
164	Jawa Barat	Kab. Cirebon	52	57.37	61.63	58.12	rendah
165	Jawa Barat	Kab. Garut	53.1	56.99	62.18	58.28	rendah
166	Jawa Barat	Kab. Indramayu	55.5	59.87	65.42	61.23	rendah
167	Jawa Barat	Kab. Karawang	53.49	58.25	62.62	59.13	rendah
168	Jawa Barat	Kab. Kuningan	54.18	57.71	64.57	59.64	rendah
169	Jawa Barat	Kab. Majalengka	52.1	56.63	62.01	57.89	rendah
170	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	55.18	60.63	64.09	61.1	rendah
171	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	53.81	56.82	64.28	59.03	rendah
172	Jawa Barat	Kab. Subang	57.26	61.69	68.89	63.62	rendah
173	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	56.39	61.56	68.83	63.41	rendah
174	Jawa Barat	Kab. Sumedang	56.18	60.5	64.88	61.46	rendah
175	Jawa Barat	Kota Bandung	54.44	56.75	64.76	59.26	rendah
176	Jawa Barat	Kota Banjar	52.32	56.1	60.57	57.15	rendah
177	Jawa Barat	Kota Bekasi	49.74	52.11	60.2	54.62	rendah
178	Jawa Barat	Kota Bogor	55.75	58.87	66.72	61.21	rendah
179	Jawa Barat	Kota Cirebon	52.54	56.52	62.81	58.18	rendah
180	Jawa Barat	Kota Depok	52.44	55.48	61.71	57.25	rendah
181	Jawa Barat	Kota Sukabumi	55.2	58.76	65.76	60.74	rendah
182	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	58.19	61.7	67.73	63.36	rendah
183	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	50.62	54.37	58.05	55.15	rendah
184	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	50.57	54.87	58.43	55.53	rendah

Pada tahun 2024 hasil Kajian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM) di Kabupaten Majalengka dengan nilai 78,51, termasuk dalam kategori “**Tinggi**”. Untuk Kajian Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TKM) tahun 2025 dengan nilai 57,89, termasuk dalam kategori “**Rendah**”.

Penurunan Nilai TKM dikarenakan pada tahun 2025 menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur

dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran TKM berfokus pada dimensi pra membaca sebesar 15 persen, dimensi saat membaca sebesar 50 persen, dan dimensi pasca membaca 35 persen.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan Upaya yang dilakukan di tahun depan

Dalam penilaian IPLM Faktor yang mempengaruhi capaian indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal diantaranya adalah :



Faktor Internal

- 1) Koleksi perpustakaan sesuai ketentuan
- 2) Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan
- 3) Pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan
- 4) Kualitas tenaga perpustakaan
- 5) Kualitas pelayanan perpustakaan

Faktor Eksternal

- 1) Banyaknya unit layanan perpustakaan yang tidak memenuhi standar nasional
- 2) Banyaknya organisasi/lembaga/ komunitas yang belum mempunyai tempat khusus layanan perpustakaan
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi pada unit layanan perpustakaan.

- **Upaya yang telah dilakukan**

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan fungsi pelayanan kelembagaan terutama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Nilai Tingkat Kegemaran (TKM) Masyarakat Majalengka dilakukan melalui Program



Pembinaan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini merupakan intervensi hulu pembangunan meliputi kebijakan terkait perpustakaan, penyediaan sarana dan prasarana serta peran pemangku kepentingan. Peran pemangku kepentingan meliputi peran negara (Perpusnas, Dispusipda), peran akademis, peran pengarang/penerbit sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan intervensi hilir pembangunan melalui upaya peningkatan tingkat literasi Masyarakat dengan mengadakan Festival Literasi yang terdiri dari beberapa kegiatan lomba-lomba, pelayanan kunjungan perpustakaan bagi sekolah, pelayanan perpustakaan keliling, peningkatan frekuensi membaca, serta upaya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembinaan Perpustakaan, sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembinaan Perpustakaan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perpustakaan	Presentase sarana dan prasarana perpustakaan dalam kondisi baik	100	100	100
Meningkatnya kualitas kompetensi tenaga perpustakaan	Persentase tenaga perpustakaan yang bersertifikat	100	-	-
Layanan perpustakaan memenuhi standar	Jumlah pengunjung perpustakaan	16.000	49.672	3,10

Perpustakaan Kabupaten Majalengka sebagai perpustakaan daerah berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di kabupaten/kota. Pembinaan yang dilaksanakan antara lain pelatihan/bimbingan teknis Pustakawan/Tenaga Perpustakaan, pendampingan aplikasi perpustakaan, Forum Diskusi Perpustakaan, pendampingan pengelolaan perpustakaan, pendampingan penataan perpustakaan, monitoring dan evaluasi perpustakaan, serta lomba perpustakaan sekolah. Perpustakaan yang dibina oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perpustakaan yang Dibina Tahun 2025

No	Perpustakaan	Banyaknya	Keterangan
1.	Perpustakaan Umum :		
	a. Perpustakaan Kelurahan	7	
	b. Perpustakaan Desa	128	
2.	Perpustakaan Pondok Pesantren	11	
3.	Perpustakaan TBM	26	
JUMLAH		217	

Jumlah koleksi judul buku dan non buku yang tersedia di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka sampai Tahun 2025 sebanyak 30.128 judul buku tercetak, 45.798 eksemplar buku tercetak dan 1.292 Judul serta Eksemplar koleksi digital, dengan rincian seperti terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Koleksi Buku
Berdasarkan Jenis Koleksi sampai dengan Tahun 2025

No.	Jenis Koleksi	Jumlah	
		Judul	Exemplar
1.	Koleksi Tercetak	30.128	45.798
2.	Koleksi Digital	1.292	1.292
JUMLAH		31.420	47.090

Majalengka sebagai perpustakaan induk melakukan aktivitas-aktivitas layanan, meliputi :

- a. Layanan ruang baca yaitu penyediaan ruang baca bagi pemustaka untuk membaca berbagai macam koleksi yang ada di perpustakaan;
- b. Layanan sirkulasi, meliputi keanggotaan, peminjaman, pengembalian, dan/atau memperpanjang peminjaman bahan pustaka yang masih dibutuhkan;
- c. Layanan akses internet yaitu akses penelusuran ke pangkalan data daring (melalui internet);
- d. Layanan bimbingan yaitu bimbingan kepada pemustaka baru secara individual maupun kelompok

Aktivitas layanan tersebut dilaksanakan di beberapa tempat yaitu :

1. Perpustakaan Pusat/Umum terletak di Jalan Raya Tonjong-Jatiwangi Kabupaten Majalengka

2. Perpustakaan MPP (Mal Pelayanan Publik) yang berlokasi di Gedung MPP Kabupaten Majalengka yang terletak di Jalan Ahmad Yani;
3. POCADI (Pojok Baca Digital) yang berlokasi di Perpustakaan Daerah;
4. KOLECER (Kotak Literasi Cerdas) yang ditempatkan di Polres Majalengka, Lapas Majalengka, Talaga Manggung serta di beberapa kecamatan dan sekolah di wilayah Kabupaten Majalengka;
5. Perpustakaan keliling, yang melakukan layanan secara *mobile* untuk mendekatkan pelayanan kepada pemustaka.
6. Layanan *Home Theathere*, Layanan Literasi dalam bentuk audio visual yang berada di gedung perpustakaan daerah.



Selain optimalisasi pelayanan, dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sekaligus meningkatkan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TKM) Dinas Arsip dan

Perpustakaan Daerah melalui bidang perpustakaan melaksanakan lomba-lomba yang dibalut dengan nama Festival Literasi, dapat disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Kegiatan Lomba Festival Literasi Tahun 2025

No	Nama Lomba	Peserta	Keterangan
1.	Lomba Mewarnai Tk. Kober	50	Juara 1 – 3 Harapan 1 – 3
2.	Lomba Bertutur Tk. SD/MI	41	Juara 1 – 3 Harapan 1 – 3
3.	Lomba Bertutur Tk. TP.PKK	25	Juara 1 – 3
4.	Lomba Perpustakaan Desa	16	Juara 1 – 3 Harapan 1 - 3
5.	Lomba Resensi Buku	50	Juara 1 – 3
6.	Lomba Video Konten	31	Juara 1 – 3 dan 7 besar pemenang



Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka antara lain adalah :

Dalam memenuhi unsur penunjang pencapaian target IPLM yang sudah ditetapkan dalam Dokumen RENSTRA Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka, kami berupaya lebih maksimal dalam pemenuhan standar yang ditentukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai penyelenggara kajian Nilai IPLM maupun TKM di Kabupaten Majalengka. Adapun upaya-upaya yang akan kami lakukan antara lain sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sosialisasi pentingnya literasi dan budaya membaca melalui penyelenggaraan kegiatan dan kompetisi yang kreatif, inovatif, serta menarik partisipasi masyarakat.
2. Membangun kerjasama dengan berbagai lembaga, organisasi, dan komunitas guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan layanan perpustakaan.
3. Menyelenggarakan pembinaan, pendampingan, serta penguatan kapasitas bagi lembaga/organisasi dalam penerapan standar fasilitas dan layanan perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah agar selaras dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.
5. Memperkuat sinergi, koordinasi, serta dukungan dari para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung implementasi kebijakan daerah.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Tabel 3.10
Program Penunjang Capaian IPLM Tahun 2025

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Pembinaan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	885.035.900

7. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada sasaran Meningkatnya Literasi Masyarakat tidak ada karena IKU hanya mencapai 8,26%.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh informasi di atas, Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan instrumen yang kompatibel untuk mengukur capaian pada sasaran strategis Meningkatnya Literasi Masyarakat karena :

- a. Sebagai dasar kebijakan pembangunan Perpustakaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- b. Untuk menilai dan mengevaluasi kemajuan pembangunan Perpustakaan dalam rangka peningkatan literasi masyarakat.

2. Sasaran Kedua

Isu strategis kearsipan berfokus pada digitalisasi arsip, peningkatan kompetensi SDM (Arsiparis), modernisasi dan pengelolaan arsip elektronik guna mewujudkan tertib arsip. Dalam menjawab isu strategis tersebut dan mewujudkan mandat dari Arsip Nasional Republik Indonesia serta korelasi dengan sasaran Bupati, maka ditetapkan sasaran strategis Arsip Terkelola Secara Tertib.

Selanjutnya, untuk Indeks Kearsipan menjadi indikator Terkelolanya Arsip Secara Tertib yang menurut Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berfokus pada pengawasan kearsipan (eksternal/internal) yang mencakup kebijakan, pembinaan, serta pengelolaan arsip dinamis dan statis.

Nilai Indeks Kearsipan yang diberikan berdasarkan akumulasi 60% bobot hasil nilai audit kearsipan eksternal ditambah 40% bobot hasil nilai audit internal, dengan aspek penilaian sebagai berikut :

1. Nilai 90 -100 kategori AA (Sangat Memuaskan)
2. Nilai 80-89,99 kategori A (Memuaskan)
3. Nilai 70-79,99 kategori BB (Sangat Baik)
4. Nilai 60-69,99 kategori B (Baik)
5. Nilai 50-59,99 kategori CC (Cukup)
6. Nilai 30-49,99 kategori C (Kurang)
7. Nilai 0-29,99 kategori D (Sangat Kurang)

IKU 2

INDEKS KEARSIPAN Arsip Terkelola Secara Tertib

Capaian Tahun 2025

104,94%

Target **82,00** Realisasi **86,05**

Realisasi Tahun 2024

81,70

Target Akhir RPD

82,00

Capaian Tahun 2024

104,76%

Realisasi
Provinsi/Pusat

95,69%

Faktor yang Mempengaruhi

Faktor yang mempengaruhi :

- Kualitas implementasi kebijakan tata kelola kearsipan
- Penerapan hasil pembinaan tata kelola kearsipan
- Kualitas sumber daya kearsipan
- Implementasi pengelolaan arsip dinamis
- Implementasi pengelolaan arsip statis
- Kualitas implementasi pengelolaan arsip inaktif
- Kualitas implementasi pengelolaan arsip elektronik

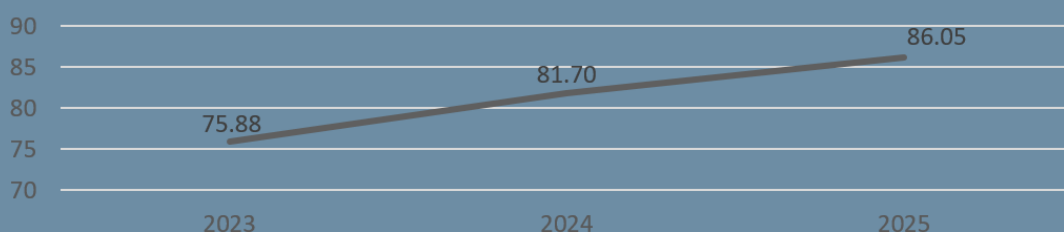
Program yang Mendukung

- Program Pengelolaan Arsip
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Efisiensi

Efisiensi atas Capaian Sasaran Strategis Arsip Terkelola Secara Tertib sebesar 0.02%

INDEKS KEARSIPAN



INDIKATOR 2

Indeks Kearsipan

Indeks Kearsipan yang meliputi Nilai Pengawasan Kearsipan merupakan salah satu indikator capaian kinerja Perangkat Daerah oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai bentuk Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar Nasional. Pengawasan Kearsipan terdiri dari Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal dilakukan ANRI dan Pemerintah Provinsi terhadap pencipta arsip sesuai wilayah kewenangannya, sedangkan Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh pencipta arsip di lingkungan masing-masing.

Pengawasan Kearsipan Eksternal dilaksanakan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan kearsipan yang terdiri dari: aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, aspek program kearsipan, aspek pengelolaan arsip inaktif, aspek penyusutan arsip, aspek sumber daya manusia kearsipan, aspek kelembagaan serta aspek prasarana dan sarana kearsipan.

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Tabel 3.11
Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kearsipan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Arsip terkelola secara tertib	Indeks kearsipan	82,00	86,05	104,94%

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis arsip terkelola secara tertib dengan indikator Indeks Kearsipan tahun 2025

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	EKSTERNAL		INTERNAL		NHP	KATEGORI
			NILAI	60%	NILAI	40%		
72	JAMBI	KABUPATEN MUARO JAMBI	8,68	5,21	1,78	0,71	5,92	D (SANGAT KURANG)
73	JAWA BARAT	KABUPATEN BEKASI	97,45	58,47	90,09	36,04	94,51	AA (SANGAT MEMUASKAN)
74	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	93,14	55,88	95,21	38,08	93,97	AA (SANGAT MEMUASKAN)
75	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	84,90	50,94	94,41	37,76	88,70	A (MEMUASKAN)
76	JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	87,30	52,38	88,12	35,25	87,63	A (MEMUASKAN)
77	JAWA BARAT	KABUPATEN MAJALENGA	86,95	52,17	84,68	33,88	86,05	A (MEMUASKAN)
78	JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	86,34	51,81	85,40	34,16	85,97	A (MEMUASKAN)

Activ
Go to :

Dokumen ini telah dibagikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSF), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)

melampaui target kinerja yang diperjanjikan yaitu sebesar 104,94% dengan target sebesar 82,00 dan realisasi sebesar 86,05. Keberhasilan dalam pencapaian target tersebut tak lain dari kerjasama antara pemangku kebijakan dan keseriusan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

Kabupaten Majalengka melaksanakan kewajiban Pengawasan Kearsipan Internal terhadap seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Hasil Pengawasan Kearsipan Internal selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Majalengka merupakan nilai rata-rata dari seluruh objek pengawasan (SKPD). Capaian nilai rata-rata Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Majalengka tahun 2025 sebesar **55,34**. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal per Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.12
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SETELAH VERIFIKASI	KATEGORI
1	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Majalengka	83.35	A (Memuaskan)
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	70.29	BB (Sangat Baik)
3	Sekretariat Daerah	65.70	B (Baik)

4	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	65.44	B (Baik)
5	Kecamatan Rajagaluh	64.77	B (Baik)
6	Kecamatan Majalengka	63.96	B (Baik)
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	63.71	B (Baik)
8	Dinas Pendidikan	63.42	B (Baik)
9	Badan Pendapatan Daerah	62.45	B (Baik)
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	62.30	B (Baik)
11	Kecamatan Cigasong	61.60	B (Baik)
12	Kecamatan Banjaran	61.22	B (Baik)
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana	61.14	B (Baik)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60.48	B (Baik)
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.04	B (Baik)
16	RSUD Majalengka	59.60	CC (Cukup)
17	Kecamatan Maja	59.45	CC (Cukup)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	59.05	CC (Cukup)
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	58.97	CC (Cukup)
20	Kecamatan Sukahaji	57.14	CC (Cukup)
21	Kecamatan Bantarujeg	56.76	CC (Cukup)
22	Kecamatan Jatiwangi	56.50	CC (Cukup)
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	56.11	CC (Cukup)
24	Inspektorat	56.01	CC (Cukup)
25	Kecamatan Sindang	55.84	CC (Cukup)
26	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	55.70	CC (Cukup)
27	RSUD Cideres	55.60	CC (Cukup)
28	Kecamatan Malausma	55.31	CC (Cukup)
29	Kecamatan Sumberjaya	54.89	CC (Cukup)
30	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	54.79	CC (Cukup)
31	Kecamatan Cikijing	54.45	CC (Cukup)
32	Kecamatan Kasokandel	54.00	CC (Cukup)
33	Kecamatan Talaga	53.79	CC (Cukup)
34	Kecamatan Panyingkiran	53.49	CC (Cukup)
35	Dinas Ketenagakerjaan. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	53.17	CC (Cukup)
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	53.16	CC (Cukup)

37	Dinas Lingkungan Hidup	53.09	CC (Cukup)
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.76	CC (Cukup)
39	Kecamatan Dawuan	52.67	CC (Cukup)
40	RSUD Talaga	51.37	CC (Cukup)
41	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	51.00	CC (Cukup)
42	Dinas Sosial	50.00	CC (Cukup)
43	Kecamatan Lemahsugih	48.85	C (Kurang)
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48.81	C (Kurang)
45	Kecamatan Leuwimunding	46.59	C (Kurang)
46	Kecamatan Sindangwangi	46.42	C (Kurang)
47	Kecamatan Jatitujuh	46.00	C (Kurang)
48	Dinas Perhubungan	45.85	C (Kurang)
49	Dinas Komunikasi dan Informatika	45.78	C (Kurang)
50	Kecamatan Cingambul	45.34	C (Kurang)
51	Kecamatan Kadipaten	44.74	C (Kurang)
52	Dinas Kesehatan	43.90	C (Kurang)
53	Kecamatan Ligung	43.77	C (Kurang)
54	Kecamatan Argapura	43.64	C (Kurang)
55	Kecamatan Palasah	42.23	C (Kurang)
56	Sekretariat DPRD	40.43	C (Kurang)
57	Kecamatan Kertajati	38.78	C (Kurang)

Sebagai informasi tambahan bahwa dalam upaya kesungguhan dalam meningkatkan kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka selain melaksanakan pengumpulan data/eviden yang diperlukan atas capaian Nilai Indeks Kearsipan yang terdiri dari LAKI dan LAKE, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka juga melaksanakan pengumpulan data/eviden yang diperlukan atas Capaian Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA) di Kabupaten Majalengka yang selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Propinsi Jawa Barat. Adapun hasil Capaian Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA) Kabupaten Majalengka mendapatkan nilai 96.45 termasuk dalam kategori **“SANGAT MEMUASKAN”**. Berikut Rekapitulasi Hasil Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Kabupaten Majalengka.

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	TDA ASKE	KEBIJAKAN	NILAI TDA	KATEGORI
			70%	30%		
71	JAMBI	KABUPATEN MERANGIN	1,27	19,36	20,63	D (SANGAT KURANG)
72	JAMBI	KABUPATEN MUARO JAMBI	3,18	7,36	10,54	D (SANGAT KURANG)
73	JAWA BARAT	KABUPATEN BEKASI	68,73	30,00	98,73	AA (SANGAT MEMUASKAN)
74	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	68,09	30,00	98,09	AA (SANGAT MEMUASKAN)
75	JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	66,82	30,00	96,82	AA (SANGAT MEMUASKAN)
76	JAWA BARAT	KABUPATEN MAJALENGKA	70,00	26,45	96,45	AA (SANGAT MEMUASKAN)
77	JAWA BARAT	KABUPATEN GARUT	68,09	27,55	95,64	AA (SANGAT MEMUASKAN)
78	JAWA BARAT	KABUPATEN SUKABUMI	66,82	28,64	95,46	AA (SANGAT MEMUASKAN)
79	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	64,91	27,27	92,18	AA (SANGAT MEMUASKAN)
80	JAWA BARAT	KABUPATEN CIANJUR	64,91	27,27	92,18	AA (SANGAT MEMUASKAN)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Act
Go 1

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Tabel 3.13
Perbandingan Indeks Kearsipan Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Arsip terkelola secara tertib	Indeks kearsipan	86,05	81,70	+4,35

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Realisasi Sasaran Strategis Arsip Terkelola Secara Tertib dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kearsipan pada tahun 2025 mengalami peningkatan nilai 4,35 dibanding dengan nilai capaian tahun 2024. Sedangkan secara capaian, mengalami peningkatan sebesar 0,2%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/Penurunan
Arsip terkelola secara tertib	Indeks kearsipan	104,94%	104,74%	+0,2%

Peningkatan realisasi dan capaian dikarenakan salah satu instrument penilaian kearsipan yaitu 4 pilar peraturan kearsipan di kabupaten Majalengka telah disahkan dan ditandatangani oleh Bupati Majalengka.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.14
Perbandingan Indeks Kearsipan Tahun 2024 dengan Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Arsip terkelola secara tertib	Indeks kearsipan	86,05	82.00	+4,05

Dari tabel diatas dapat diketahui realisasi Tahun 2025 sudah melebihi target akhir Renstra (Tahun 2026). Oleh karena itu, target Tahun 2025 dan Tahun 2026 perlu disesuaikan lagi agar capaian target dapat terus meningkat dari tahun ke tahun dengan melaksanakan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang sesuai standar kearsipan.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Tabel 3.15
Perbandingan Indeks Kearsipan Tahun 2025
dengan Rata-rata Standar Kab/Kota Provinsi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Rata-rata Provinsi	Hasil Perbandingan
Arsip terkelola secara tertib	Indeks kearsipan	86,05	95,69	+9,64

Berdasarkan tabel diatas rata-rata Indeks kearsipan kab/kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 yaitu sebesar 95,69 dan termasuk dalam kategori AA “Sangat Memuaskan”. Jika realisasi Indeks kearsipan Kabupaten Majalengka tahun 2025 dibandingkan dengan rata-rata Indeks Kearsipan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, maka realisasi Indeks Kearsipan Kabupaten Majalengka lebih kecil 9,64.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan Upaya yang dilakukan di tahun depan

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator Indeks kearsipan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

- 1) Kualitas Implementasi kebijakan tata kelola kearsipan
- 2) Penerapan hasil pembinaan tata kelola kearsipan
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya kearsipan
- 4) Implementasi pengelolaan arsip dinamis
- 5) Implementasi pengelolaan arsip statis
- 6) Kualitas implementasi pengelolaan arsip in aktif
- 7) Kualitas implementasi pengelolaan arsip elektronik

❖ **Upaya yang telah dilakukan**

Peningkatan kualitas layanan kearsipan sekaligus meningkatkan capaian target Indeks Kearsipan Tahun 2025, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal (LAKI) dan Pengawasan Kearsipan External (LAKE) pada seluruh Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2029 tentang Pengawasan Kearsipan. Peraturan ini mengatur konfrenhensif tentang pengawasan internal dan eksternal, meliputi perencanaan, pelaksanaan (audit), pelaporan serta tindak lanjut.

A. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka sebanyak 57. Seluruh Perangkat Daerah menjadi Objek Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025. Dalam rangka pembinaan kepada perangkat daerah dilakukan pemberian penghargaan atau apresiasi kepada perangkat daerah yang meraih nilai terbaik dalam pengelolaan arsip dinamis. Penghargaan diberikan kepada 3 Perangkat Daerah terbaik dalam pengelolaan arsip, dan diberikan Plakat serta Piagam. Pemenang pengelola arsip terbaik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah :

- 1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dengan nilai 70,29, kategori “Baik Sekali”
- 2) Sekretariat Kabupaten Majalengka dengan nilai 65,70, kategori “Baik”
- 3) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dengan nilai 65,44, kategori “Baik”

Sedangkan Nilai LAKE Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat besar $86,95 \times 60\% = 52,17$.

B. Penyediaan Informasi Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tersebut, maka perlu diselenggarakannya kegiatan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Versi 3, monitoring dan evaluasi implementasi Aplikasi SRIKANDI Versi 3 dan memberikan pelayanan SIKN-JIKN melalui Pameran Virtual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam hal ini mendukung pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan unit kerja Pemerintah Majalengka sebagai salah satu upaya langkah nyata dalam mewujudkan digitalisasi arsip dengan menerapkan surat elektronik secara Nasional demi mewujudkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (SRIKANDI).

Mewujudkan Majalengka dalam upaya peningkatan Implementasi Aplikasi SRIKANDI Versi 3 yang telah dilaksanakan penggunaan Aplikasi pada Perangkat Daerah pada Tahun 2025 sebagai perwujudan transformasi digital dalam lingkup kearsipan

telah 58 Perangkat Daerah yang menggunakan. Berikut tabel transaksi pada aplikasi SRIKANDI V.3 :

Tabel 3.16
Tabel Rekapitulasi Tingkat Implementasi Aplikasi SRIKANDI V3
Tahun 2025

No	Nama Unit	SRIKANDI			
		Naskah Masuk	Naskah Keluar	Disposisi	Berkas
1	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	1.674	999	2.566	109
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	966	663	1.984	7
3	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.269	578	7.674	15
4	RSUD Cideres	2.311	2.372	8.025	10
5	Kecamatan Cikijing	642	512	573	18
6	Sekretariat Daerah	4.507	4.656	1.382	266
7	Inspektorat	2.741	1.980	6.446	934
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.191	349	2.228	7
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.420	2.068	3.518	9
10	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.932	697	4.530	50
11	Dinas Kesehatan	11.096	12.195	1.417	101
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.367	1.771	4.016	72
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.181	1.255	7.155	21
14	Kecamatan Sindang	721	901	531	10
15	RSUD Talaga	329	417	81	3
16	Kecamatan Maja	1.153	996	287	450
17	Kecamatan Kadipaten	375	449	207	38
18	RSUD Majalengka	465	203	438	3
19	Kecamatan Sindangwangi	350	461	436	5
20	Kecamatan Jatiwangi	502	495	857	22
21	Kecamatan Majalengka	725	553	528	434
22	Kecamatan Argapura	610	816	114	3
23	Kecamatan Sukahaji	644	1149	48	2
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.488	531	925	14
25	Kecamatan Kertajati	807	488	8	4
26	Kecamatan Cingambul	665	437	117	11

27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	534	603	465	145
28	Kecamatan Rajagaluh	419	483	299	17
29	Kecamatan Lemahsugih	308	98	74	2
30	Kecamatan Dawuan	414	615	306	2
31	Kecamatan Sumberjaya	473	457	353	1
32	Kecamatan Bantarujeg	414	475	15	6
33	Dinas Pemuda dan Olah Raga	730	200	34	7
34	Dinas Lingkungan Hidup	1.422	1.424	102	16
35	Kecamatan Ligung	325	429	92	4
36	Kecamatan Talaga	306	411	113	0
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	449	570	406	6
38	Kecamatan Panyingkiran	410	466	18	8
39	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	367	436	751	15
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	556	840	346	125
41	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	457	594	701	96
42	Kecamatan Cigasong	373	419	5	51
43	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	593	632	1.030	22
44	Badan Pendapatan Daerah	375	473	433	78
45	Kecamatan Kasokandel	455	109	43	13
46	Kecamatan Malausma	359	423	19	2
47	Dinas Pendidikan	2.889	1.987	1.678	28
48	Dinas Perhubungan	438	533	252	12
49	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	575	866	55	5
50	Kecamatan Palasah	275	366	14	1
51	Dinas Sosial	407	201	79	4
52	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	354	473	44	11
53	Kecamatan Banjaran	400	103	2	2
54	Sekretariat DPRD	393	453	52	10
55	Kecamatan Leuwimunding	387	50	10	2
56	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	861	801	578	56
57	Kecamatan Jatitujuh	330	30	1	4

Pada tahun 2025 telah melaksanakan pembinaan pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) terhadap 23 UPTD, 1 Labsekda, 32 PKM serta 15 SMP (Sekolah Menengah Pertama). Pendampingan pembinaan secara mandiri bagi Perangkat Daerah/Kecamatan yang masih rendah dalam implementasi Aplikasi SRIKANDI Versi 3. aktivasi Srikandi V.3 kepada Seluruh Perangkat Daerah.



Giati Pendampingan Aplikasi SRIKANDI v.3 di Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, terdiri dari RB General dan RB Tematik. RB General adalah upaya untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital, sedangkan RB Tematik adalah upaya untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB. Sembilan strategi utama dalam kebijakan birokrasi digital adalah :

1. Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile;
2. Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional;
3. Percepatan Transformasi Squad Model;

4. Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan SuperApps Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi;
5. Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN;
6. Penguatan Kerja Kolaboratif (collaborative working) berbasis kinerja melalui SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah);
7. Pembangunan MPP dan MPP Digital Services;
8. Penguatan Pengawasan dengan four line of defense; serta
9. Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan Big Data dan Artificial Intelligence

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh pemerintah daerah adalah pada level Mikro. Salah satu sasaran adalah **Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital** dengan kegiatan utama yang terkait dengan arsip adalah **Pelaksanaan Arsip Digital** dengan output utama adalah tersedianya Kebijakan Arsip Digital dan Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kebijakan Arsip Digital. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaiannya adalah Tingkat Digitalisasi Arsip yang dihasilkan dari aktivitas **Audit Pengelolaan Arsip Elektronik (APAE)**. SRIKANDI merupakan cara baru berbasis dalam pengelolaan arsip.

• **Upaya yang akan dilakukan**

- 1) Peningkatan implementasi aplikasi srikandi Versi 3 ke desa – desa;
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Aplikasi SRIKANDI Versi 3;
- 3) Sering dilakukan pelaporan progress pencapaian peningkatan implementasi SRIKANDI Versi 3 dalam setiap Rapat Pimpinan;
- 4) Lebih meningkatkan koordinasi dan dukungan dari para pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya dalam mendukung kebijakan daerah;

- 5) Melaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Tabel 3.17
Program Penunjang Capaian Indeks Kearsipan Tahun 2025

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Pengelolaan arsip	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip	88.364.000,-
2.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip	77.600.000,-

7. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks kearsipan pada sasaran arsip terkelola secara tertib pada Program Pengelolaan Arsip serta Perlindungan dan Penyelamatan Arsip yaitu 0,02% atau sebesar Rp. 36.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 165.964.000 dan realisasinya Rp. 165.928.000.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh informasi diatas, Indikator Kearsipan merupakan instrumen yang kompatibel untuk mengukur capaian pada sasaran strategis Arsip Terkelola Secara Tertib karena :

- **Sebagai Alat Ukur Objektif (Evaluasi & Audit):** Indikator kearsipan (seperti hasil pengawasan) menjadi patokan atau standar untuk menilai apakah tata kelola kearsipan sudah sesuai dengan kaidah, prinsip, dan peraturan yang berlaku. Ini mempermudah audit untuk mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan sistem yang diperlukan.

- **Meningkatkan Efisiensi Operasional:** Indikator membantu memantau apakah sistem pengelolaan arsip dinamis telah berjalan efektif dan efisien, sehingga mempercepat proses pencarian data/informasi yang dibutuhkan.
- **Mewujudkan Budaya Tertib Arsip:** Indikator memberikan acuan yang jelas bagi instansi atau perusahaan untuk mencapai tingkat "tertib arsip", baik dari segi fisik, penataan, maupun sistem penyusutan.
- **Menjamin Keamanan dan Penyelamatan Arsip:** Indikator digunakan untuk menilai tingkat perlindungan arsip vital dan aset penting lainnya, serta kepatuhan terhadap jadwal retensi arsip.
- **Menilai Keberhasilan Reformasi Birokrasi:** Pengelolaan arsip yang baik yang diukur melalui indikator kearsipan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Indeks Kearsipan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Tingkat Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	8,26	95,12
1.	Arsip terkelola secara tertib	Indeks kearsipan	104,94	99,98



04

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Rata-rata capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 yaitu sebesar 56,6% dengan sebanyak 2 sasaran. Adapula 1 sasaran yang tidak tercapai sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang, diantaranya pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mencapai 8,26%.

Dalam penilaian IPLM Faktor yang mempengaruhi capaian indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal diantaranya adalah :

Faktor Internal

- 1) Koleksi perpustakaan sesuai ketentuan
- 2) Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan
- 3) Pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan
- 4) Kualitas tenaga perpustakaan
- 5) Kualitas pelayanan perpustakaan

Faktor Eksternal

- 1) Banyaknya unit layanan perpustakaan yang tidak memenuhi standar nasional

- 2) Banyaknya organisasi/lembaga/ komunitas yang belum mempunyai tempat khusus layanan perpustakaan
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi pada unit layanan perpustakaan.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini merupakan intervensi hulu pembangunan meliputi kebijakan terkait perpustakaan, penyediaan sarana dan prasarana serta peran pemangku kepentingan. Peran pemangku kepentingan meliputi peran negara (Perpusnas, Dispusipda), peran akademis, peran pengarang/penerbit sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan intervensi hilir pembangunan melalui upaya peningkatan tingkat literasi Masyarakat dengan mengadakan Festival Literasi yang terdiri dari beberapa kegiatan lomba-lomba, pelayanan kunjungan perpustakaan bagi sekolah, pelayanan perpustakaan keliling, peningkatan frekuensi membaca, serta upaya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka telah menggunakan sumber daya pada Tahun 2025 sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi anggaran untuk sasaran Indeks Kearsipan yang tercapai sebesar 0,02% atau Rp. 36.000,00 sedangkan untuk sasaran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat efisiensi anggaran tidak dapat dihitung karena sasaran tidak mencapai 100%.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs ONO HARYONO, MP**
Jabatan : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Agustus 2025



Pihak Pertama,
Drs ONO HARYONO, MP
NIP. 19701023 199009 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70 Nilai
2.	Arsip Terkelola Secara Tertib	Indeks Kearsipan	82 Nilai

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 889.091.900,00	APBD
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 4.387.563.723,00	APBD
3.	Pengelolaan Arsip	Rp 88.365.000,00	APBD
4.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 79.092.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 5.444.112.623,00	

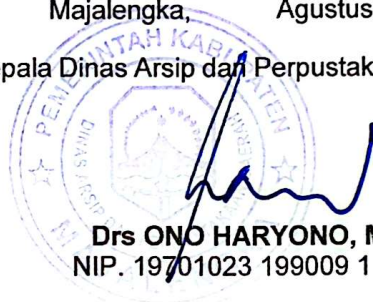


Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Agustus 2025

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah,



Drs ONO HARYONO, MP
NIP. 19701023 199009 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs ONO HARYONO, MP**
Jabatan : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



Majalengka, Oktober 2025


Pihak Pertama,

Drs ONO HARYONO, MP
NIP. 19701023 199009 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70 Nilai
2.	Arsip Terkelola Secara Tertib	Indeks Kearsipan	82 Nilai

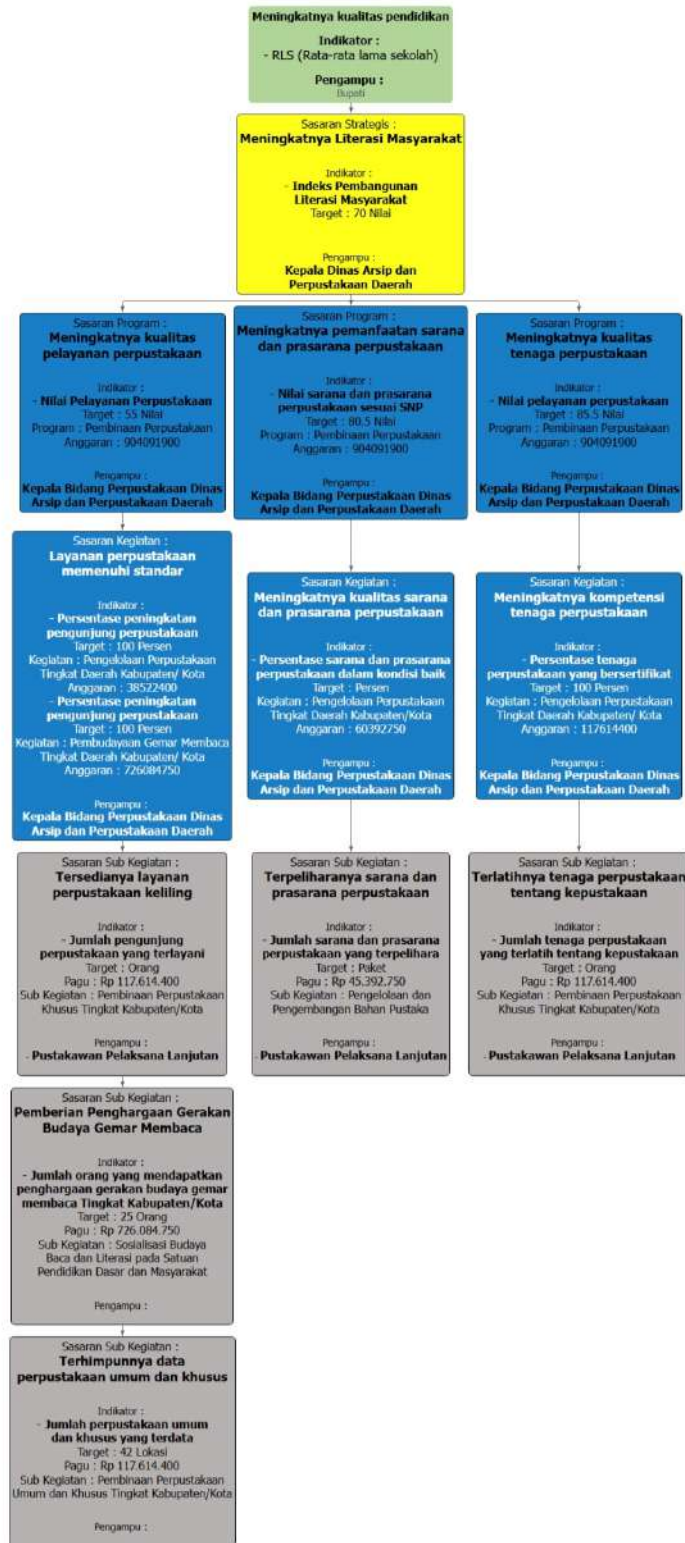
Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 885.035.900,00	APBD
2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 4.075.381.287,00	APBD
3. Pengelolaan Arsip	Rp 88.364.900,00	APBD
4. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 77.064.000,00	APBD
JUMLAH	Rp 5.125.846.087,00	


Bupati Majalengka,

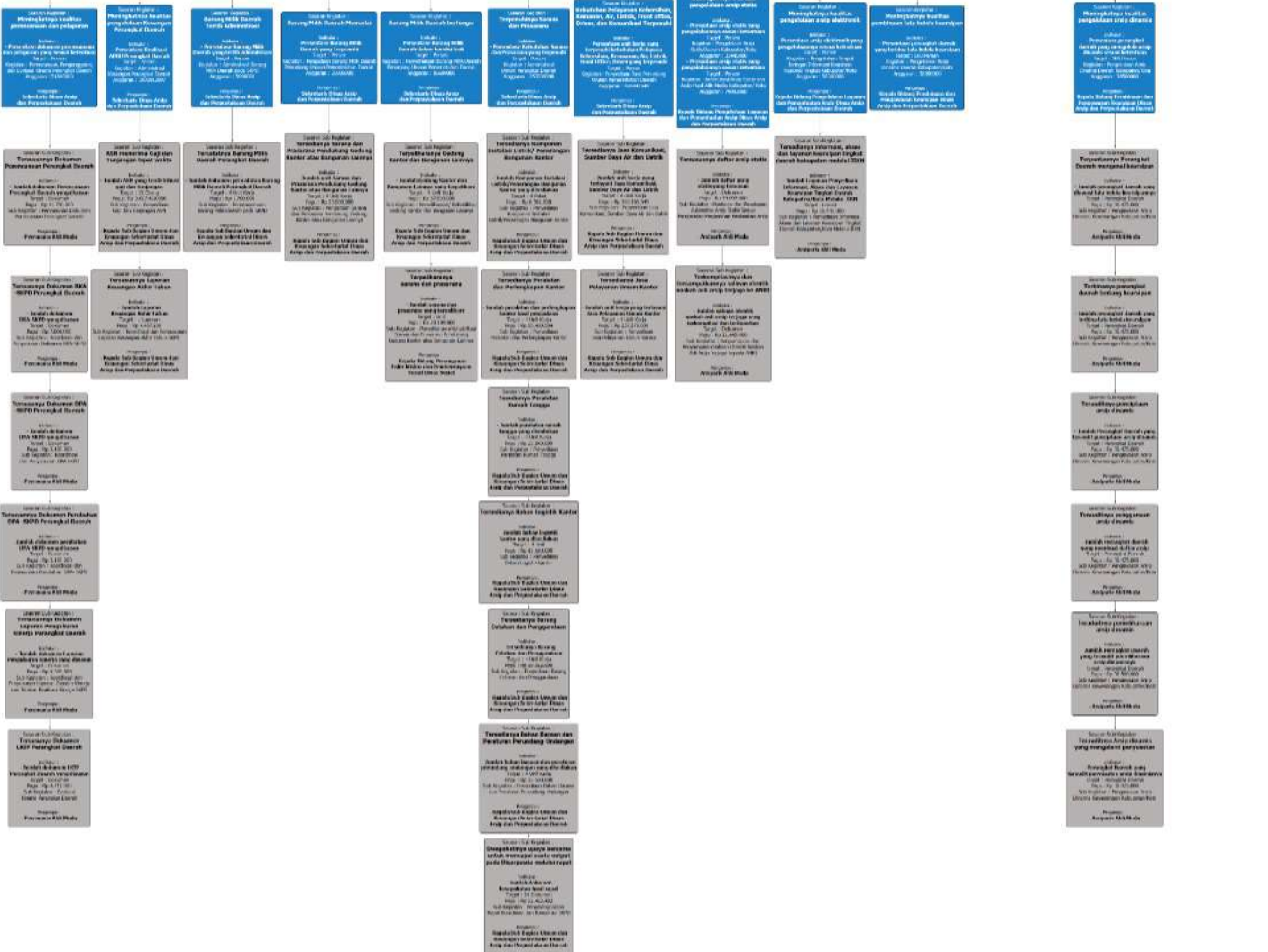
Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Oktober 2025
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah,


Drs ONO HARYONO, MP
NIP. 19701023 199009 1 001



Perencanaan strategis yang berlandaskan pada visi dan misi organisasi yang terdapat dalam dokumen berikut:
- Misi: Berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial.
- Visi: Menjadi organisasi terdepan dalam pemberdayaan masyarakat.
- Tujuan: Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial.



PENYERAHAN LKIP KEPADA PIMPINAN



BUKTI SEBAR LKIP

12.00

86



KB.DISARPUSDA MJLK
A, A, Arsip Alpian, Bu Ai Arsip, De...



8,0 MB

09.19



Izin pak kadis pak sekdis
menyampaikan video konten
geber hari ini 🙏

09.19



Bu Teti Arsip



LKIP 2025_DISARPUSDA.pdf

56 halaman • 4,2 MB • PDF

Assalamualaikum wr.wb.
Kepada Yth. Seluruh
pegawai Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka,
kami sampaikan LKIP
Tahun 2025 untuk
diketahui oleh semua
pegawai Disarpusda
Kab.Majalengka.

11.22



Ketik pesan



**PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEGAWAI DENGAN KINERJA TERBAIK**





**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 8 Tahun 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang :
- a. Bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam amanat Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2020 Pasal 13 adalah kewajiban Perangkat Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang....

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
6. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 27 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LKIP OPD) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LKIP OPD) Dinas Arsip dan

Perpustakaan...

Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025
sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2026

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 2 Februari 2026

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka



Drs. ONO HARYONO, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 197010231990091001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth .Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Yth. Sdr. Kepala Bagian Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Yth. Sdr. Sekretaris, Para Kepala Bidang, Kasubag Umum dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 8 Tahun 2026

TANGGAL : 2 Februari 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS / KANTOR
1.	Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
2.	Ketua	: Sekretaris pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
3.	Sekretaris	: Fungsional Perencana pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
4.	Anggota	: 1. Kepala Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka 2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka 3. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka 5. Fungsional Arsiparis pada Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka 6. Fungsional Arsiparis pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka 7. Fungsional Pustakawan pada Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka 8. Para Fungsional Arsiparis dan Pustakawan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka 9. Para Fungsional Umum pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



Drs. ONO HARYONO, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 197010231990091001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP
DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 8 Tahun 2026
TANGGAL : 2 Februari 2026

URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

I. Penanggung Jawab

1. Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

II. Ketua

1. Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

III. Sekretaris

1. Menyelenggarakan Administrasi Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Membantu Ketua dalam Melaksanakan Tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Membantu ketua dalam Menyusun Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

IV. Anggota

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka



Drs. ONO HARYONO, MP

Pembina Utama Muda
NIP. 197010231990091001